

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Daftar Isi

Demokrasi Elitis? Relasi Kekuasaan Pasca-Pilkada Syarif Hidayat	169–180
Perilaku dan Sikap Sosial-Politik Mahasiswa dalam Pilpres 2009 Ari Pradhanawati	181–186
Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan <i>E-Government</i> Achmad Habibullah	187–195
Strategi Peningkatan Akses Pasar dan Peluang Inovasi Usaha Kecil Nelayan Pasuruan Edy Wahyudi	196–205
Pengembangan Kapasitas Perencanaan Daerah dalam Pengelolaan Pesisir secara Terpadu di Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara R. Hamdani Harahap	206–212
Management of Local Forestry Resources in Overcoming Poverty and Environmental Issues Slamet Rosyadi	213–220
Respon Komunitas Waria Surabaya terhadap Konstruksi Subjek Transgender di Media Indonesia Rachmah Ida	221–228
Pasang sebagai Modal Sosial Pengelolaan Hutan pada Masyarakat Adat Ammatowa Sarkawi B. Husain dan Sri Endah Kinasih	229–235
Wacana Dominan dalam Teks <i>Awig-awig</i> I.B. Putera Manuaba	236–243
Pengaruh Kausalitas Tingkat Fertilitas Total (TFR) Penduduk terhadap Tingkat Demokrasi Fendy E. Wahyudi	244–255

Pengembangan Kapasitas Perencanaan Daerah dalam Pengelolaan Pesisir secara Terpadu

R. Hamdani Harahap¹

Jurusan Antropologi, FISIP, Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT

The background of this research was based on the fact of the poor condition of coastal zone management planning capacity, especially in North Sumatra. It was therefore necessary to analyze the development of local planning capacity in coastal management. The aim of this research was to formulate the alternative of capacity building of coastal management plan that able to maintain the quality of environment and increase the economy and social culture of coastal community. Human Resource as a major priority in the development of alternative capacity aimed to improve the competence of planning, income generation, career development and human resource capacity, and should be measured regularly. The article based on research is conducted in East Coast of North Sumatera. The reasearch was conducted using Analytical Hierarchy Process (AHP) method. The result of this research showed that the three important factors in the capacity building coastal management were economic element, social element and ecology element. There were eleven alternative policy strategies needed to be done to achieve integrated coastal zone management and sustainable that can be practiced for the Eastern coastal region of North Sumatra. It could be concluded that based on AHP analysis human resources was the first priority in building the capacity of marine and coastal management plan in East Coast of North Sumatera, followed by cooperation, rules and organization.

Key words: *Analytical Hierarchy Processs (AHP), planning capacity building, sustainable development, coastal management, human resource*

Pengembangan kapasitas perencanaan daerah penting dikaji karena dari berbagai literatur terlihat bahwa kondisi masyarakat nelayan relatif miskin. Hal ini terlihat pada kondisi pemukiman yang kumuh, tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah, rentannya mereka terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang melanda, dan ketidakberdayaan mereka terhadap intervensi pemodal, dan penguasa yang datang. Beberapa ahli menyatakan penyebab kemiskinan adalah faktor struktural (Mubyarto *et al.* 1984, Mubyarto dan Sutrisno 1988, Resusun 1985, Rizal 1985, Zulkifli 1989). Sementara Tarigan (1990) yang melakukan penelitian di Langkat, Deli Serdang, Tanjung Balai, Nias dan Sibolga mengungkapkan bahwa kebijakan modernisasi alat tangkap ikan memang secara makro membawa dampak positif yaitu terjadinya kenaikan pendapatan dan perolehan devisa. Tetapi bersamaan dengan itu, muncul kesenjangan sosial ekonomi yaitu peningkatan kesejahteraan signifikan pada rumah tangga nelayan lapisan atas pemilik armada. Beberapa ahli lain menyatakan penyebab kemiskinan

nelayan adalah faktor kultural dan rusaknya lingkungan hidup di wilayah pesisir (Harahap 1992, 1993, 1994). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan mereka adalah faktor budaya dan rusaknya sumber daya alam khususnya daerah laut dan perikanan (pesisir) yaitu ekosistem mangrove yang telah diubah menjadi tambak udang. Demikian juga Ginting (1996) menyatakan bahwa motorisasi alat tangkap setelah terbitnya Keppres No. 39 Tahun 1980 tentang larangan pukat ternyata tidak menjangkau kepentingan rumah tangga nelayan tradisional. Kemiskinan nelayan di Deli Serdang semakin kompleks karena adanya pola hidup konsumerisme pada musim ikan sehingga tidak ada simpanan pada waktu menghadapi musim paceklik. Selanjutnya Juwono (1998) juga mengaitkan antara kemiskinan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup dan moral masyarakat nelayan di Desa Kirdowono, Pantai Utara, Jawa Tengah.

Selain masalah kemiskinan, saat ini permasalahan lingkungan di wilayah pesisir Indonesia sangat beragam, mulai dari masalah *over capacity* di sektor

¹ Korespondensi: R. Hamdani Harahap. Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, USU. Jalan Prof Sofyan No 1. Kampus USU Medan, Indonesia (20155). Telepon 061-8211965. E-mail: rhamdani@yahoo.com

perikanan, kerusakan hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun serta abrasi pantai dan gelombang pasang hingga masalah tsunami. Permasalahan ini sangat terkait dengan kemiskinan masyarakat pesisir, kebijakan yang tidak tepat, rendahnya penegakan hukum (*law enforcement*), dan rendahnya kemampuan sumber daya manusia (Dahuri 2003).

Permasalahan di pesisir di atas bila dikaji lebih lanjut memiliki akar permasalahan yang mendasar. Menurut Dahuri (2003) ada lima faktor, yaitu *pertama* tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan kemiskinan, *kedua* konsumsi berlebihan dan penyebaran sumber daya yang tidak merata, *ketiga* kelembagaan, *keempat*, kurangnya pemahaman tentang ekosistem alam, dan *kelima* kegagalan sistem ekonomi dan kebijakan dalam menilai ekosistem alam.

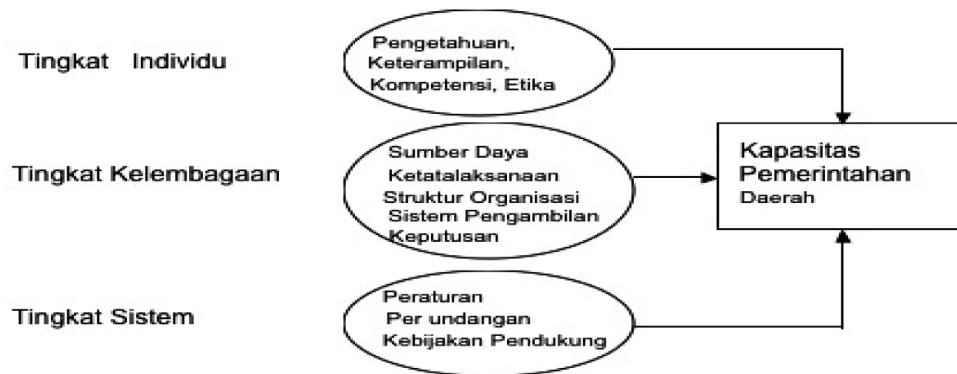
Beberapa hasil studi mengungkapkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumber daya pesisir yang selama ini dijalankan masih bersifat sektoral dan terpilah-pilah. Padahal karakteristik ekosistem pesisir yang secara ekologis saling terkait satu sama lain termasuk dengan ekosistem lahan atas, serta beraneka sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan sebagai potensi pembangunan yang pada umumnya terdapat dalam suatu hamparan ekosistem pesisir. Sehingga pengelolaan sumber daya wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan terpadu dan holistik. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu dinyatakan sebagai proses pemanfaatan sumber daya pesisir serta ruang yang memperhatikan aspek konservasi dan keberlanjutannya. Adapun konteks keterpaduan meliputi dimensi sektor, ekologis, hirarkhi pemerintahan, antar bangsa/negara, dan disiplin ilmu (Cicin-Sain dan Knecht 1998, Kay dan Alder 1999). Memang Departemen Perikanan dan Kelautan telah mengembangkan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia seperti Marine Coastal Resource Management Program (MCRMP), namun pengelolaan ini menghadapi masalah yaitu masih belum terpenuhinya standar kapasitas perencanaan pengelolaan pesisir.

Untuk mengatasi permasalahan di atas maka penting sekali menganalisis pengembangan kapasitas perencanaan daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir. Pengembangan kapasitas (*capacity building*) yaitu suatu proses nasional yang panjang, di mana kemampuan dan *skill* individu dalam memecahkan masalah menjadi semakin meningkat berdasarkan pengembangan pengalaman mereka, sehingga kinerja kapasitas organisasi dan kelembagaan menjadi kuat

dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya alam yang lestari. Konsep pengembangan kapasitas (*capacity building*) sebenarnya masih menyisakan sedikit perbedaan terminologi yang digunakan. Sebagian ilmuwan memaknai pengembangan kapasitas (*capacity building*) sebagai *capacity development* atau *capacity strengthening*, mengisyaratkan suatu prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada (*existing capacity*). Sedangkan yang lain lebih merujuk pada *constructing capacity*, sebagai proses yang kreatif membangun kapasitas yang belum nampak (Karwono 2008).

Selanjutnya Brown (*dalam* Karwono 2008) mendefinisikan *capacity building* sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sedangkan Morison (*dalam* Karwono 2008) melihat *capacity building* sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian kegiatan, perubahan multilevel di dalam individu dan organisasi dan sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. Artinya tahapan pengembangan kapasitas dapat dilakukan pada level individu, organisasi dan sistem. Pada level individu, pengembangan kapasitas dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan etika individu. Pada level kelembagaan, pengembangan kapasitas dapat dilakukan pada aspek sumber daya, katatalaksanaan, struktur organisasi, dan sistem pengambilan keputusan. Pada level sistem, pengembangan kapasitas dapat dilakukan pada aspek peraturan perundangan dan kebijakan pendukung. Untuk lebih jelasnya Karwono (2008) menyampaikan tingkatan pengembangan kapasitas tersebut pada Gambar 1.

Keban (2000) juga menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas (*capacity building*) merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian pada dimensi: (1) pengembangan sumber daya manusia, (2) penguatan organisasi, dan (3) reformasi kelembagaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa peningkatan kemampuan difokuskan kepada (1) kemampuan tenaga kerja (*labor*), (2) kemampuan teknologi yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau kelembagaan, dan (3) kemampuan kapital yang diwujudkan dalam bentuk dukungan sumber daya, sarana dan prasarana, atau pada kemampuan tiga dimensi yaitu (1) individu, (2) organisasi, dan (3) jaringan (*network*).



Gambar 1.
Tingkatan Pengembangan Kapasitas (Karwono, 2008)

Berkaitan dengan hal di atas World Bank misalnya memfokuskan peningkatan kepada: (1) pengembangan sumber daya manusia, khususnya pelatihan (*training*), rekrutmen, pemanfaatan dan pemberhentian tenaga kerja profesional, manajerial dan teknis, (2) organisasi, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya dan gaya manajemen, (3) jaringan kerja interaksi organisasi yaitu koordinasi kegiatan organisasi, fungsi jaringan kerja dan interaksi formal dan informal, (4) lingkungan organisasi yaitu aturan dan perundang-undangan yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menghambat tugas pembangunan dan dukungan keuangan dan anggaran dan (5) lingkungan kegiatan yang luas, yaitu mencakup faktor politik, ekonomi dan kondisi yang berpengaruh terhadap kinerja. Sementara itu, UNDP memfokuskan pada tiga dimensi yaitu (1) tenaga kerja (dimensi sumber daya manusia) yaitu kualitas SDM dan cara SDM, (2) modal (dimensi fisik) yaitu menyangkut peralatan, bahan yang diperlukan dan gedung dan (3) teknologi yaitu organisasi di mana gaya manajemen, fungsi perencanaan, pembuatan keputusan, pengendalian dan evaluasi serta sistem informasi manajemen. United Nations memusatkan perhatiannya kepada (1) mandate atau struktur legal, (2) struktur kelembagaan, (3) pendekatan manajerial kemampuan organisasional dan teknis, dan (5) kemampuan fiskal lokal dan (6) kegiatan-kegiatan program (Karwono 2008).

Dalam tulisan ini pengembangan kapasitas perencanaan daerah dilihat dari indikator SDM, Kerja sama, Organisasi, dan Aturan. Sumber daya manusia adalah sumber daya yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, sebagai kontributor strategis usaha dalam pencapaian kinerja organisasi khususnya dalam kaitan pengelolaan lingkungan hidup baik

di lembaga pemerintahan maupun non pemerintah. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan fungsi tertentu. Organisasi diartikan juga sebagai kumpulan grup dari individual untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Aturan adalah tatacara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah dan sebagainya) yang sudah ditetapkan supaya diturut, atau tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan, termasuk juga adat sopan santun. Aturan dalam penelitian ini juga mencakup perundang-undangan seperti UU, Perda, Peraturan Kepala Daerah atau SK Kepala Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir. Kerja sama yang dimaksudkan di sini adalah kerja sama apa saja yang dilakukan oleh lembaga/instansi dan *stakeholder* yang mengelola wilayah pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir di pantai Timur Sumatera Utara.

Berdasarkan hal di atas maka yang dimaksud dengan pengembangan kapasitas perencanaan dalam pengelolaan wilayah pesisir dalam tulisan ini adalah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem perencanaan wilayah pesisir yang dalam hal ini dilihat dari instrumen perencanaan, kapasitas perencanaan (SDM, organisasi, aturan dan kerja sama) dan proses perencanaan untuk mencapai tujuan *sustainable development* yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, peningkatan kondisi sosial budaya, dan pelestarian lingkungan pesisir.

Metode

Untuk mengetahui konsep atau strategi pengembangan kapasitas perencanaan wilayah pesisir di Sumatera Utara dilakukan dengan Analysis

Tabel 1.
Peringkat Alternatif Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Wilayah Pesisir

No.	Peringkat	Tujuan Pengembangan Kapasitas	Bobot	Persentase
1.	I	SDM	0,3153	31,53
2.	II	Kerja sama	0,2909	29,09
3.	III	ATURAN	0,2430	24,30
4.	IV	ORGANISASI	0,1508	15,08
Jumlah			1	100

Hierarchy Process (AHP). Metode ini digunakan untuk mengetahui strategi apa saja yang menjadi prioritas dalam rangka pengembangan kapasitas perencanaan kawasan pesisir di masing-masing daerah.

Pada dasarnya *Analysis Hierarchy Process* (AHP) adalah suatu teori umum tentang pengukuran. Ia digunakan untuk menemukan skala rasio baik dari perbandingan pasangan yang diskrit maupun kontinyu. Perbandingan ini dapat diambil dari ukuran aktual atau dari suatu skala dasar yang mencerminkan kekuatan perasaan dan preferensi relatif. AHP memiliki perhatian khusus tentang penyimpangan dari konsistensi, pengukuran dan pada ketergantungannya di dalam dan di antara kelompok elemen strukturnya (Latifah 2005). Pendapat lain Iryanto (2008) mengatakan bahwa metode AHP merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang menggunakan faktor logika, intuisi, pengalaman, pengetahuan, emosi dan rasa untuk dioptimasi dalam suatu proses yang sistematis. Metode AHP ini mulai dikembangkan oleh Thomas I. Saaty, matematikawan yang bekerja pada University of Pittsburgh di AS pada awal tahun 1970-an.

Fokus AHP dalam tulisan ini adalah pengembangan kapasitas perencanaan di wilayah pesisir pantai Timur Sumatera Utara. Fokus pengembangan kapasitas perencanaan wilayah pesisir ditujukan pada tiga kriteria yang mengacu kepada pembangunan berwawasan lingkungan (*sustainable development*) yaitu kriteria ekonomi, sosial dan ekologi.

Pengumpulan data dengan metode AHP dilakukan dengan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD: Focus Group Discussion) terhadap 15 informan dari kalangan akademisi dan praktisi yang memahami persoalan pengelolaan kawasan pesisir Timur Propinsi Sumatera Utara. Proses diskusi ini untuk merumuskan alternatif dalam pengembangan kapasitas perencanaan daerah termasuk alternatif tujuan dan alternatif kebijakan. Selanjutnya diskusi

juga disertai dengan penyebaran kuesioner untuk menganalisis alternatif yang telah dirumuskan dengan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data hasil analisis AHP, persentase pemilihan alternatif kebijakan dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah pengembangan kapasitas SDM yakni sebesar 31,53%. Oleh karena itu pengembangan kapasitas SDM merupakan alternatif kebijakan yang menduduki peringkat pertama. Sementara pengembangan kapasitas dalam bidang kerja sama menempati urutan kedua dengan persentase sebesar 29,09%, dan pengembangan kapasitas bidang aturan pada peringkat ketiga dengan persentase 24,30% serta pengembangan kapasitas bidang organisasi peringkat keempat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel di atas menunjukkan pilihan informan untuk alternatif pengembangan kapasitas dalam upaya perencanaan pengelolaan wilayah pesisir di pesisir Timur Sumatera Utara pada peringkat pertama adalah pengembangan kapasitas SDM, dan selanjutnya adalah kerja sama, aturan dan organisasi.

Demikian juga untuk prioritas kriteria berdasarkan persepsi informan dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2.
Besar Prioritas Tiap Elemen Kriteria

No.	Elemen	Prioritas
1.	Ekonomi	0,6065
2.	Sosial	0,2161
3.	Ekologi	0,1774

Analisis konsistensi dikatakan baik apabila nilai *consistency ratio* (CR) ≤ 0.10 . Jika kita nilai CR ≤ 0.10 maka dapat dikatakan informan konsisten dengan jawabannya. Dari perhitungan sebelumnya dapat diperoleh rasio konsistensi matrik seperti pada Tabel 4.

Tabel 3.
Besar Prioritas Tujuan Berdasarkan Kriteria

No.	Unsur	Prioritas
1.	X (Mendekatkan akses modal kepada masyarakat untuk memberi nilai tambah produksinya)	0,3389
2.	Y (Membentuk asosiasi/koperasi nelayan untuk mengatasi sistem rantai pemasaran produk perikanan)	0,0891
3.	Z (Mengadakan pelatihan manajemen usaha perikanan skala rumah tangga)	0,1785
4.	P Pemberdayaan LSM, PT/Sekolah/Lembaga Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir)	0,1125
5.	Q (Mengadopsi norma/nilai tradisional yang ada dalam masyarakat ke dalam Perda pengelolaan wilayah pesisir)	0,0139
6.	R (Mengadakan pelatihan tentang hukum lingkungan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem serta UU Perikanan bagi aparat penegak hukum)	0,0345
7.	S (Membuat kesepakatan bersama tentang kewenangan pengelolaan wilayah pesisir)	0,0551
8.	A (Mengembangkan pola pemanfaatan hutan mangrove berwawasan lingkungan)	0,0972
9.	B (Meningkatkan kemampuan staf teknis dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran)	0,0450
10.	C (Mengembangkan program penanganan sampah untuk desa dalam pengelolaan pesisir)	0,0115
11.	D (Menerbitkan perda pengelolaan wilayah pesisir)	0,0238

Tabel 4.
Rasio Konsistensi Matrik

Level	Kriteria	Consistency Ratio (CR)
2	Pemilihan Kriteria	0,0082
3	Elemen Tujuan Ekonomi	0,0000
	Elemen Tujuan Sosial	0,0553
	Elemen Tujuan Ekologi	0,0467
4	X (Mendekatkan akses modal kepada masyarakat untuk memberi nilai tambah produksinya)	0,0851
	Y (Membentuk asosiasi/koperasi nelayan untuk mengatasi sistem rantai pemasaran produk perikanan)	0,0186
	Z (Mengadakan pelatihan manajemen usaha perikanan skala rumah tangga)	0,0149
	P Pemberdayaan LSM, PT/Sekolah/Lembaga Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir)	0,0057
	Q (Mengadopsi norma/nilai tradisional yang ada dalam masyarakat ke dalam Perda pengelolaan wilayah pesisir)	0,0181
	R (Mengadakan pelatihan tentang hukum lingkungan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem serta UU Perikanan bagi aparat penegak hukum)	0,0262
	S (Membuat kesepakatan bersama tentang kewenangan pengelolaan wilayah pesisir)	0,0246
	A (Mengembangkan pola pemanfaatan hutan mangrove berwawasan lingkungan)	0,0079
	B (Meningkatkan kemampuan staf teknis dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran)	0,0323
	C (Mengembangkan program penanganan sampah untuk desa dalam pengelolaan pesisir)	0,0295
	D (Menerbitkan perda pengelolaan wilayah pesisir)	0,0603

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa *Consistency Ratio* (CR) masing-masing kriteria seluruhnya adalah konsisten ($\leq 0,1$). Dari Tabel juga terlihat bahwa untuk elemen ekonomi, diperoleh nilai CR = 0 dan ini menunjukkan bahwa jawaban responden konsisten sempurna. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa seluruh kriteria dalam hierarki pemilihan alternatif pengembangan kapasitas perencanaan pengelolaan wilayah pesisir adalah konsisten.

Berdasarkan uraian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Berdasarkan jawaban dari kuesioner yang disebar diperoleh nilai CR untuk seluruh kriteria adalah $\leq 0,1$. Hal ini berarti bahwa jawaban yang diberikan

responden seluruhnya konsisten, 2) Dari seluruh kuesioner tersebut diperoleh bahwa SDM merupakan alternatif prioritas pertama dalam pengembangan kapasitas perencanaan pengelolaan wilayah pesisir pantai Timur Sumatera Utara, disusul oleh kerja sama, aturan dan organisasi, 3) Prioritas kriteria pengembangan kapasitas perencanaan pengelolaan wilayah pesisir laut di wilayah pesisir Timur Sumatera Utara adalah elemen ekonomi (60,65%), elemen sosial (21,61%) dan elemen ekologi (17,74%), 4) Sedangkan alternatif kebijakan pengembangan kapasitas perencanaan wilayah pesisir adalah: a) a.1) Mendekatkan akses modal kepada masyarakat untuk memberi nilai tambah produksinya: 33,89%, a.2) Membentuk asosiasi/koperasi nelayan untuk mengatasi sistem rantai pemasaran produk

Tabel 5.
Rasio Konsistensi Hierarki

Level	Kriteria	CH	$\overline{CH}$	CRH
2	Kriteria	0.0230	1.2859	0.0179
3	Tujuan Elemen Ekonomi	0.0492	1.4800	0.0332
	Tujuan Elemen Sosial	0.0629	1.8000	0.0350
	Tujuan Kriteria Ekologi	0.0623	1.8000	0.0346
4	X (Mendekatkan akses modal kepada masyarakat untuk memberi nilai tambah produksinya)	0.0766	0.9000	0.0851
Alternatif	Y (Membentuk asosiasi/koperasi nelayan untuk mengatasi sistem rantai pemasaran produk perikanan)	0.0167	0.9000	0.0186
	Z (Mengadakan pelatihan manajemen usaha perikanan skala rumah tangga)	0.0134	0.9000	0.0149
	P Pemberdayaan LSM, PT/Sekolah/ Lembaga Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir)	0.0052	0.9000	0.0057
	Q (Mengadopsi norma/nilai tradisional yang ada dalam masyarakat ke dalam Perda pengelolaan wilayah pesisir)	0.0163	0.9000	0.0181
	R (Mengadakan pelatihan tentang hukum lingkungan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem serta UU Perikanan bagi aparat penegak hukum)	0.0236	0.9000	0.0262
	S (Membuat kesepakatan bersama tentang kewenangan pengelolaan wilayah pesisir)	0.0221	0.9000	0.0246
	A (Mengembangkan pola pemanfaatan hutan mangrove berwawasan lingkungan)	0.0071	0.9000	0.0079
	B (Meningkatkan kemampuan staf teknis dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran)	0.0290	0.9000	0.0323
	C (Mengembangkan program penanganan sampah untuk desa dalam pengelolaan pesisir)	0.0266	0.9000	0.0295
	D (Menerbitkan Perda pengelolaan wilayah pesisir)	0.0543	0.9000	0.0603

Catatan: CH = Consistency Hierarchy (Hirarki Konsistensi), CRH = .Consistency Ratio Hierarchy (Konsistensi Rasio Hirarki)

perikanan: 8,91%, a.3) Mengadakan pelatihan manajemen usaha perikanan skala rumah tangga: 17,85%, b) b.1) Pemberdayaan LSM, PT/Sekolah/ Lembaga Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir: 11,25%, b.2) Mengadopsi norma/nilai tradisional yang ada dalam masyarakat ke dalam Perda pengelolaan wilayah pesisir: 1,39%, b.3) Mengadakan pelatihan tentang hukum lingkungan. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem serta UU Perikanan bagi aparat penegak hukum: 3,45%, b.4) Membuat kesepakatan bersama tentang kewenangan pengelolaan wilayah pesisir: 5,51%, c) c.1) Mengembangkan pola pemanfaatan hutan mangrove berwawasan lingkungan: 09,72%, c.2) Meningkatkan kemampuan staf teknis dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran: 4,50%, c.3) Mengembangkan program penanganan sampah untuk desa dalam pengelolaan pesisir: 1,15%, c.4) Menerbitkan Perda pengelolaan wilayah pesisir: 2,38%.

Dalam kaitan hal tersebut hasil analisis AHP telah diidentifikasi sebanyak 11 alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan kapasitas perencanaan wilayah pesisir di Sumatera Utara. Berdasarkan hasil dari analisis AHP alternatif kebijakan yang harus dilakukan agar tercapainya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1) Mendekatkan akses modal kepada masyarakat untuk memberi nilai tambah produksinya, 2) Membentuk asosiasi/koperasi nelayan untuk mengatasi sistem rantai pemasaran produk perikanan, 3) Mengadakan pelatihan manajemen usaha perikanan skala rumah tangga, 4) Pemberdayaan LSM, PT/ Sekolah/Lembaga Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir, 5) Mengadopsi norma/nilai tradisional yang ada dalam masyarakat ke dalam Perda pengelolaan wilayah pesisir, 6) Mengadakan pelatihan tentang hukum lingkungan. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem serta UU Perikanan bagi aparat penegak hukum, 7) Membuat kesepakatan bersama tentang kewenangan pengelolaan wilayah pesisir, 8) Mengembangkan pola pemanfaatan hutan mangrove berwawasan lingkungan, 9) Meningkatkan kemampuan staf teknis dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran, 10) Mengembangkan program penanganan sampah untuk desa dalam pengelolaan pesisir, 11) Menerbitkan Perda pengelolaan wilayah pesisir.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan metode AHP diperoleh prioritas strategi yang harus dilakukan dalam rangka pengembangan kapasitas perencanaan pengelolaan wilayah pesisir, yaitu:

Elemen SDM merupakan prioritas pertama dalam alternatif pengembangan kapasitas perencanaan pengelolaan wilayah pesisir pantai Timur Sumatera Utara, disusul oleh kerja sama, aturan dan organisasi. Menempatkan SDM sebagai prioritas utama dalam alternatif pengembangan kapasitas perencanaan tentunya diarahkan pada peningkatan kompetensi, peningkatan pendapatan serta pembinaan karir dan kemampuan SDM secara teratur dan terukur.

Kriteria pengembangan kapasitas perencanaan wilayah pesisir pantai Timur Sumatera Utara adalah elemen ekonomi, elemen sosial, dan elemen ekologi. Ini artinya ketiga elemen ini menjadi bagian penting ketika upaya pengembangan kapasitas perencanaan wilayah pesisir akan dilakukan.

Ada 11 alternatif strategi kebijakan yang harus dilakukan agar tercapainya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan yang bisa dipraktikkan untuk kawasan pesisir Timur Sumatera Utara.

Daftar Pustaka

- Anonimus (2004) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Cicin-Sain and Knecht R.W (1998) Integrated Coastal and Marine Management. Washington D.C: Island Pres.
- Dahuri, R. (2003) Keanekaragaman Hayati Laut: Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ginting, Bengkel (1996) Respon Rumah Tangga Nelayan Terhadap Program Pembangunan Bidang Ekonomi dan Kesra: Studi Kemiskinan di Dusun Nelayan Desa Percut Kecamatan Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Tesis, IPB, Bogor.
- Harahap, R.H. (1992) Nelayan dan Kemiskinan (Studi Antropologis di Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang). Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian USU, Medan.
- Harahap, R.H. (1993) Kearifan Ekologi Masyarakat Nelayan Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara. Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian USU, Medan.
- Harahap, R.H. (1994) Orientasi Nilai Budaya Nelayan Propinsi Sumatera Utara (Studi Perbandingan terhadap Masyarakat Nelayan Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dan Masyarakat Nelayan Cina di Desa Sungai Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu). Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian USU, Medan.
- Harahap, R.H. (1994a) Keterkaitan Faktor Kebudayaan dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Nelayan dan Pelestarian Lingkungan di Daerah Pantai Timur Sumatera Utara. Tesis, Program Pascasarjana IPB, Bogor.
- Iryanto (2008) Penentuan Rating Kabupaten-Kota dengan AHP untuk Mendukung Pengembangan Wilayah Berdasarkan Nilai Infrastruktur di Wilayah Sumatera Utara. Disertasi, Sekolah Pascasarjana USU, Medan.
- Juwono, PS. (1998) Ketika Nelayan Harus Sandar Dayung Studi Nelayan Miskin di Desa Kirdowono. Jakarta: KONPHALINDO.
- Karwono, H. (2008) Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building Decentralization) dan Peran Lembaga Pendidikan. [Diakses 28 Oktober 2008]. <http://karwono.wordpress.com>.
- Kay, R. & Alder, J (1999) Coastal Planning and Management. London: E & FN Spon.
- Keban, Y.T. (2000) Good Governance dan Capacity Building Sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan. Jakarta: Capacity Building for Local Governance Bappenas.
- Latifah, S. (2005) Prinsip-prinsip Dasar Analytical Hierarchy Process. Medan: Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian USU.
- Mubyarto, Loekman S dan Michael RD (1984) Nelayan dan Kemiskinan Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai. Jakarta: Rajawali.
- Mubyarto dan Loekman S (1988) Studi Pengembangan Desa Pantai di Propinsi Riau. Yogyakarta: Pusat Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM.
- Resusun, D (1985) Dayung Basah Periuk Berisi. Studi tentang Beberapa Aspek Sosial Ekonomi Nelayan Bagang di Pulau Sembilan. Dalam Muklis dan Kathryn Robinson. Masyarakat Pantai. Ujung Pandang: Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin.
- Rizal, J (1985) Kehidupan Wanita Bira. Dalam Muklis dan Kathryn Robinson. Masyarakat Pantai. Ujung Pandang: Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin.
- Santoso, U (2008) Hutan Mangrove, Permasalahan dan Solusinya. <http://uripsantoso.wordpress.com>. Tgl 26 Oktober 2008.
- Tarigan, K. (1990) Pengaruh Motorisasi Penangkapan Terhadap Distribusi Pendapatan Nelayan di Sumatera Utara. Disertasi, UNPAD, Bandung.
- Zulkifli (1989) Pemborong dan Nelayan: Pola Hubungan Patron Klien pada Masyarakat Nelayan (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kodya Medan). Tesis, UGM, Yogyakarta.